

# **GERBANG EMAS: INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN BERKELANJUTAN DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

## **GERBANG EMAS: A COMMUNITY EMPOWERMENT INNOVATION FOR THE SUSTAINABLE POVERTY ALLEVIATION AND NATIONAL CHARACTER BUILDING**

**Annisaa Dhia Fadhilah**

Lembaga Administrasi Negara

### **ABSTRAK**

Kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 11,1% pada tahun 2015 menjadi 8,47% pada 2025 (BPS, 2025). Namun, ketimpangan sosial (Gini Ratio 0,375) dan rendahnya tingkat pendidikan penduduk miskin (45% berpendidikan SD ke bawah) menandakan bahwa pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Pendekatan berbasis bantuan sosial jangka pendek terbukti belum mampu menciptakan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks RPJMN 2025-2029 dan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 1 dan 10, diperlukan strategi inovatif yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada pembangunan karakter dan pemberdayaan komunitas. *GERBANG EMAS* (*Gerakan Pembangunan Karakter dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Masyarakat*) dirancang sebagai model transformasi sosial yang mengintegrasikan tiga pilar utama: (1) penguatan karakter dan nilai kerja produktif, (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui *community-based development*, dan (3) kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan *pentahelix* (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media).

Rekomendasi kebijakan menekankan pentingnya reposisi program penanggulangan kemiskinan menjadi *community-driven innovation*, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, serta integrasi pendidikan karakter dalam seluruh program pemberdayaan. Dengan strategi ini, pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat statistik, tetapi juga bertransformasi menjadi gerakan sosial berkelanjutan yang menumbuhkan kemandirian dan martabat masyarakat miskin di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Karakter, Community-Based Development, Pentahelix Collaboration.*

### **ABSTRACT**

*Indonesia has experienced a consistent decline in poverty, from 11.1% in 2015 to 8.47% in 2025 (BPS, 2025). However, social inequality (Gini Ratio 0.375) and the low educational attainment of the poor (45% with only primary education) indicate that poverty reduction still faces deep structural and cultural challenges. Short-term welfare programs have proven insufficient to foster sustainable community self-reliance.*

*Within the framework of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2025-2029 and the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goals 1 and 10, an innovative approach is needed that integrates economic, social, and moral dimensions. GERBANG EMAS (Community-Based Character Building and Poverty Alleviation Movement) is proposed as a transformative model built upon three pillars: (1) strengthening character and productive values, (2) empowering communities through community-based development, and (3) promoting multi-sector collaboration via the pentahelix approach (government, academia, business, community, and media).*

*Policy recommendations highlight the need to reposition poverty alleviation initiatives into community-driven innovations, strengthen local institutional capacity, and integrate character education into all empowerment programs. This approach transforms poverty reduction from a mere statistical goal into a sustainable social movement that cultivates self-reliance and dignity among Indonesia's poor communities.*

**Keywords:** *Poverty, Community Empowerment, Character Development, Community-Based Development, Pentahelix Collaboration.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan menurun hingga 4,5-5% persen, serta kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada tahun 2026. Target ini merupakan kelanjutan dari RPJMN 2020-2024 yang menekankan pembangunan manusia unggul dan penguatan daya saing melalui transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Meskipun terdapat kemajuan signifikan, tantangan kemiskinan masih kompleks dan bersifat multidimensi. Faktor-faktor seperti keterbatasan pendidikan, rendahnya keterampilan, ketimpangan akses ekonomi, dan lemahnya nilai karakter produktif menjadi penyebab utama kemiskinan yang berkelanjutan.

Agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia pada tahun 2030. Indonesia telah mengintegrasikan tujuan ini dalam dokumen RPJMN dan Rencana Aksi Nasional SDGs. Dalam konteks nasional, pengentasan kemiskinan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya

pembangunan karakter dan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berdaya. Pendekatan berbasis masyarakat (*community-based development*) menjadi strategi utama dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi dari akar rumput.

Meskipun tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan sosial masih bertahan dengan *Gini Ratio* relatif stabil di kisaran 0,37–0,39 selama satu dekade terakhir. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Daerah perdesaan masih menyumbang 12,17% penduduk miskin, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan (6,18%). Selain itu, 45% penduduk miskin berpendidikan maksimal Sekolah Dasar, menunjukkan keterbatasan kemampuan adaptasi terhadap ekonomi modern dan digital.

Kebijakan pengentasan kemiskinan perlu bertransformasi dari pendekatan *charity-based* menuju *empowerment-based*. Dalam hal ini, pembangunan karakter, pendidikan nilai, dan pemberdayaan sosial ekonomi harus berjalan beriringan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat program yang berorientasi pada *community resilience*,

bukan sekadar *cash transfer*. Program GERBANG EMAS menjadi salah satu model yang menjawab kebutuhan tersebut dengan menekankan integrasi antara karakter, ekonomi, dan kolaborasi lintas sektor.

Policy brief ini bertujuan menawarkan GERBANG EMAS sebagai inovasi strategis dalam pengentasan kemiskinan berkelanjutan melalui pendekatan pembangunan karakter dan pemberdayaan masyarakat. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat tata kelola program pengentasan kemiskinan di tingkat nasional dan daerah.

## B. DESKRIPSI MASALAH

Kemiskinan di Indonesia bukan hanya permasalahan pendapatan, melainkan masalah multidimensi yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, akses ekonomi, dan ketahanan sosial. *Multidimensional Poverty Index (MPI)* menunjukkan bahwa keluarga miskin cenderung memiliki keterbatasan pada lebih dari tiga dimensi dasar kehidupan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan produktivitas dan pendapatan tetap stagnan, sementara lemahnya karakter kerja dan nilai sosial memperburuk ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Struktur ekonomi yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan menyebabkan ketimpangan kesempatan. Akses terhadap modal usaha, teknologi, dan pasar digital masih terbatas bagi masyarakat miskin di desa. Rendahnya literasi digital dan lemahnya jejaring sosial-ekonomi mempersempit peluang mobilitas vertikal. Di sisi lain, masih terdapat kebijakan yang tumpang tindih antarinstansi dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.

Sebagian besar program pengentasan kemiskinan masih bersifat *top-down*, dengan karakter bantuan langsung tunai (BLT, PKH, BPNT) tanpa penguatan

kapasitas masyarakat. Hal ini menimbulkan ketergantungan dan melemahkan daya inisiatif warga. Di banyak daerah, kelompok penerima manfaat belum diberdayakan secara sistematis untuk mengelola potensi lokal, seperti ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, atau UMKM desa.

Kebijakan pengentasan kemiskinan sering berjalan parsial antarinstansi, tanpa sinergi antara pendidikan, ekonomi, sosial, dan karakter. Pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil belum sepenuhnya berkolaborasi dalam satu kerangka kerja terpadu. Padahal, pendekatan *Pentahelix Collaboration* (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media) terbukti efektif dalam mendorong inovasi sosial di berbagai daerah.

Kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan karakter. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan gotong royong merupakan dasar moral pembangunan ekonomi lokal. Program yang hanya menekankan aspek ekonomi tanpa transformasi nilai akan berakhir sementara. GERBANG EMAS mengintegrasikan dimensi nilai ini sebagai strategi keberlanjutan sosial.

## C. REKOMENDASI

Program GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan Karakter dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Masyarakat) dirancang melalui pendekatan menyeluruh berbasis *Pentahelix Collaboration*. Tiga pilar utamanya adalah:

### 1. Pilar 1: Pembangunan Karakter dan Nilai (Character Development)

- Menanamkan nilai kerja keras, integritas, dan tanggung jawab sosial melalui pelatihan berbasis karakter.
- Mengembangkan *community leader* lokal sebagai agen perubahan (local changemaker).
- Integrasi nilai *SMART ASN* dalam pengelolaan birokrasi

daerah agar program kemiskinan dijalankan dengan akuntabilitas tinggi.

## 2. **Pilar 2: Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan Sosial**

- Membentuk *Desa Produktif* melalui penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif.
- Menyediakan akses modal mikro berbasis komunitas (community revolving fund).
- Mengembangkan *digital inclusion program* untuk literasi teknologi dan pemasaran online produk lokal.

## 3. **Pilar 3: Kolaborasi Pentahelix dan Inovasi Sosial**

- Mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam satu ekosistem.
- Membangun pusat kolaborasi daerah (regional innovation hub) untuk replikasi program berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- Memastikan keberlanjutan program melalui indikator kinerja sosial dan ekonomi yang terukur.

Implementasi GERBANG EMAS diusulkan melalui mekanisme lintas sektor, dengan koordinasi di bawah Kementerian Koordinator PMK dan dukungan Bappenas sebagai pengarah kebijakan nasional. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat miskin serta menciptakan model pemberdayaan yang dapat direplikasi di berbagai daerah Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

Ananta, A., & Arifin, E. N. (2023). Socioeconomic Inequality and Poverty Dynamics in Indonesia: Towards Inclusive Development. *Asian Development Policy Review*, 11(4), 215–230.

Prabowo, H., & Sulastri, R. (2021). Integrating Character Education in Poverty Alleviation Programs: A Case Study of Local Empowerment Initiatives. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 189–204.

Suharto, E. (2020). Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks SDGs di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, 19(2), 75–92.

Wicaksono, A., & Lestari, S. D. (2022). Community-Based Development as a Strategy for Sustainable Poverty Reduction in Indonesia. *Journal of Rural Development Studies*, 8(2), 145–162.

### **Peraturan Perundang**

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025. Jakarta: BPS RI.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Rencana Strategis Kemensos 2025–2029: Penguatan Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan. Jakarta: Kemensos RI.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 (sebagai dasar transisi menuju RPJMN 2025–2029).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

United Nations Development Programme (UNDP). (2024). Sustainable Development Goals (SDGs) Report 2024: Indonesia Country Profile. Jakarta: UNDP Indonesia.

### **Dokumen**

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025. Jakarta: BPS RI.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Rencana Strategis Kemensos 2025–2029: Penguatan Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan. Jakarta: Kemensos RI.

United Nations Development Programme (UNDP). (2024). Sustainable

Development Goals (SDGs) Report 2024: Indonesia Country Profile. Jakarta: UNDP Indonesia.

### **Website**

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Data Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Indonesia. Diakses dari: <https://www.bps.go.id>

Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Diakses dari: <https://www.bappenas.go.id>

Kementerian Sosial RI. (2025). Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Diakses dari: <https://kemensos.go.id>

United Nations Development Programme Indonesia. (2025). Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Dashboard. Diakses dari: <https://www.undp.org/indonesia>